

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BPR Hardi Mas Mandiri
Tahun 2024

A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	: Jl. Veteran No. 314 Bareng Lor Klaten Utara Klaten
Nomor Telepon	: (0272) 3269991
Penjelasan Umum	: Dengan modal inti BPR kurang dari Rp50 Miliar, BPR belum memenuhi struktur organisasi sesuai ketentuan BPR antara lain Dewan Komisaris berjumlah 1 orang diakhir semester 2 (bulan november) salah satu komisaris mengundurkan diri, serta Direksi berjumlah 1 orang Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan ditahun 2024 belum terpenuhi tetapi semester 1 dan 2 tahun 2024 telah dilakukan rekrutmen oleh Pemegang Saham untuk posisi Direktur YMFK sudah dilakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK dan hasil Uji telah disetujui oleh OJK, tetapi sampai akhir tahun 2024 belum dilakukan RUPS dan belum dilaporkan kepada KEMENKUMHAM. BPR sudah Menunjuk Pejabat Eksekutif untuk fungsi Kepatuhan, fungsi Manajemen Risiko, Fungsi Audit Intern, Fungsi APU PPT tetapi BPR belum memiliki Fungsi Strategi Anti Fraud. BPR masih dalam proses penunjukan AP KAP yang ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan BPR tahun 2024. Tahun 2024 tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat mengurangi keuntungan BPR. BPR berupaya memenuhi standar ketentuan dan kebijakan BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. BPR akan lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja agar dapat mencapai rencana bisnis BPR yang sudah direncanakan dan disusun oleh Direksi serta di setujui Dewan Komisaris
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	: Peringkat 2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	: Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	NIK*) : 3327121706670005 Nama : Djoko Mohammad Effendi Jabatan : Direktur Tugas dan Tanggung Jawab**) : (1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang –undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS. (2) Direksi dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian (3) Direksi menerapkan Tata Kelola yang baik manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi (4) Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) dan auditor ekstern (5) Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan /atau otoritas dan lembaga lain
dst.	
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris***):	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	NIK*) : 3374132008710001 Nama : Rahmad Cahyo Agung Jabatan : Komisaris Tugas dan Tanggung Jawab**) : (1)Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS. (2)Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR (3)dewan komisaris dalam menjalankan tugas dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR kecuali penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai POJK BMPK dan hal

	lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (4) Dewan komisaris mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris (5) Dewan komisaris melakukan pengawasan pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR, penerapan manajemen risiko sesuai POJK manajemen risiko. (6) Dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direski atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) dan auditor ekstern (7) Dewan Komisaris menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan /atau otoritas dan lembaga lain
dst.	
Rekomendasi kepada Direksi:	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite.

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)
4.	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
5.	Komite Lainnya**)
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Komite belum diterapkan di BPR karena modal inti BPR kurang dari 50 Miliar

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK *)	Nama	Keahlian **)	Komite***)					Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1.									
2.									
dst.									

Struktur, Keanggotaan Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Komite belum diterapkan di BPR karena modal inti BPR kurang dari 50 Miliar

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK *)	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	3327121706670005	Djoko Mohammad Effendi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Anggota Direksi tidak memiliki Saham pada BPR

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	3374132008710001	Rahmad Cahyo Agung	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki Saham pada BPR

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain*)/**))	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	3327121706670005	Djoko Mohammad Effendi	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Anggota Direksi tidak memiliki Saham pada Perusahaan lain

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain*)/**))	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	3374132008710001	Rahmad Cahyo Agung	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki Saham pada Perusahaan lain

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Perusahaan Lain

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain*)/**))	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	3374010703730002	Harmawan Mardiyanto	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	3374015401760001	Maharsanty Dyan Nugraheni	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	3374013103860001	Nugroho Hardiko Utomo	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4.	3374111308550002	Tjahjo Poernomo	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Anggota Pemegang Saham tidak memiliki Saham pada Perusahaan lain

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	3327121706670005	Djoko Mohammad Effendi	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Anggota Direksi tidak memiliki Hubungan Keuangan pada BPR

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	3374132008710001	Rahmad Cahyo Agung	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki Hubungan Keuangan pada BPR

3. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK*)	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	3374010703730002	Harmawan Mardiyanto	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	3374015401760001	Maharsanty Dyan Nugraheni	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	3374013103860001	Nugroho Hardiko Utomo	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4.	3374111308550002	Tjahjo Poernomo	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Anggota Pemegang Saham tidak memiliki Hubungan Keuangan pada BPR

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	3327121706670005	Djoko Mohammad Effendi	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Anggota Direksi tidak memiliki Hubungan Keluarga pada BPR

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	3374132008710001	Rahmad Cahyo Agung	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki Hubungan Keluarga pada BPR

3. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK*)	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	3374010703730002	Harmawan Mardiyanto			Maharsanty Dyan Nugraheni (Saudara Kandung), Nugroho Hardiko Utomo (Saudara Kandung), Tjahjo Poernomo (Paman)
2	3374015401760001	Maharsanty Dyan Nugraheni			Harmawan Mardiyanto (Saudara Kandung), Nugroho Hardiko Utomo (Saudara Kandung), Tjahjo Poernomo (Paman)
3	3374013103860001	Nugroho Hardiko Utomo			Harmawan Mardiyanto (Saudara Kandung), Maharsanty Dyan Nugraheni (Saudara Kandung), Tjahjo Poernomo (Paman)
4	3374111308550002	Tjahjo Poernomo			Harmawan Mardiyanto, Maharsanty Dyan Nugraheni, Nugroho Hardiko Utomo (Keponakan)

Anggota Pemegang Saham memiliki Hubungan Keluarga dengan Pemegang Saham pada BPR

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)	1	138.000.000	2	198.000.000
2.	Tunjangan	1	51.339.348	2	2.632.812
3.	Tantiem				
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunerasi lainnya**)				
Total Remunerasi			189.339.348		200.632.812
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan				
2.	Transportasi	1	12.000.000	2	6.000.000
3.	Asuransi kesehatan				
4.	Fasilitas lainnya***)				
Total Fasilitas Lain					
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			201.339.348		206.632.812

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan*)	Perbandingan**)
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1.96
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.21
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.77
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.80

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	09 Januari 2024	6 orang	Evaluasi RBB, Evaluasi/ Penetapan Kebijakan, Strategi BPR, Pengawasan APU PPT
2.	19 April 2024	7 orang	Evaluasi RBB, Evaluasi/ Penetapan Kebijakan, Strategi BPR, Pengawasan Tata Kelola
3.	10 Juni 2024	7 orang	Evaluasi RBB, Evaluasi/ Penetapan Kebijakan, Strategi BPR, Pengawasan APU PPT
4.	22 Juli 2024	7 orang	Evaluasi RBB, Evaluasi/ Penetapan Kebijakan, Strategi BPR, Pengawasan Manajemen Risiko
5.	11 Desember 2024	6 orang	Evaluasi RBB, Evaluasi/ Penetapan Kebijakan, Strategi BPR, Pemantapan RBB 2025

Pelaksanaan rapat Dewan komisaris selama tahun 2024 sebanyak 5 kali

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran**) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	3374132008710001	Rahmad Cahyo Agung	5	0	100%

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada rapat Dewan Komisaris selama tahun 2024 sebanyak 5 kali

K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian**)	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian-nya***)	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Selama periode tahun 2024, BPR tidak terdapat penyimpangan internal (internal Fraud) yang dilakukan baik Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan Tetap maupun Karyawan tidak tetap dengan proses kerja dan kegiatan operasional yang mempengaruhi kondisi keuangan BPR.

L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Selama periode tahun 2024 BPR tidak mengalami permasalahan Hukum baik Perdata maupun Pidana

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan			
1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Selama periode tahun 2024 BPR tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan karena BPR berupaya agar transaksi yang mengandung benturan kepentingan tidak terjadi pada Dewan Komisaris, Direksi maupun Karyawan.

N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK / NPWP *)	Jumlah (Rp)
1.	24 Februari 2024	Bantaun Sosial	Bansos penghijauan Penanaman Pohon di Desa Pidekso Wonogiri	Panitia Perbarindo	-	400,000
2.	15 Maret 2024	Bantuan Sosial	Bantuan Takjil Ramadhan Masjid Jami An Nuur	Takmir Masjid Jami An Nuur Bareng Lor	-	600,000
3.	15 Maret 2024	Bantuan Sosial	Sumbangan Kampanye Anti Narkoba	Panitia Kampanye	-	5,000
4.	06 April 2024	Bantuan Sosial	Bantuan Takjil Ramadhan Masjid Baiturahman	Takmir Masjid Baiturahman Kauman	-	50,000

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK / NPWP *)	Jumlah (Rp)
5.	15 Juni 2024	Sumbangan	Sumbangan Lingkungan Gerakan Anti Narkoba	Panitia	-	5,000
6.	07 September 2024	Sumbangan	Partisipasi Stiker bebas Narkoba	Panitia	-	5,000
7.	18 Desember 2024	Sumbangan	Partisipasi Sosialisasi Anti Narkoba dan Kekerasan	Panitia	-	10,000

Selama tahun 2024 BPR memberikan dana untuk kegiatan sosial sebanyak 7 kali dengan nominal Rp1,075,000 (Satu Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Klaten, 29 April 2025
PT BPR Hardi Mas Mandiri



Rahmad Cahyo Agung
Komisaris



Djoko Mohammad Effendi
Direktur Utama